



**NASKAH AKADEMIK
KAJIAN KEBIJAKAN KURIKULUM
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM
2007**

KATA PENGANTAR

Pemberlakuan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi. Sebelumnya, pengembangan kurikulum dilakukan pemerintah pusat, yaitu Pusat Kurikulum sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh satuan pendidikan.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan langsung oleh satuan pendidikan memberikan harapan tidak ada lagi permasalahan berkenaan dengan pelaksanaannya. Hal ini karena penyusunan kurikulum satuan pendidikan (sekolah) seharusnya telah mempertimbangkan segala potensi dan keterbatasan yang ada.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar nasional pendidikan: standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Salah satu dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yakni standar isi (SI) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum disamping standar kompetensi lulusan (SKL). Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Pengembangan kurikulum telah dilakukan oleh sebagian satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar isi. Sebagai acuan, standar isi ini masih perlu ditelaah. Penelaahan dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang ada-tidaknya rumusan pada standar isi yang menimbulkan permasalahan bila digunakan untuk mengembangkan kurikulum. Penelaahan terhadap naskah kurikulum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kemungkinan keterlaksanaannya.

Salah satu hasil kajian tersebut adalah **Naskah Akademik Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama**. Hasil kajian ini memberikan gambaran tentang muatan naskah standar isi dan kurikulum sebagai masukan bagi perumus kebijakan pendidikan lebih lanjut.

Pusat Kurikulum menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Direktorat di lingkungan Depdiknas, kepala sekolah, pengawas, guru, dan praktisi pendidikan, serta Depag. Berkat bantuan dan kerja sama yang baik dari mereka, naskah akademik ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Kepala Pusat Kurikulum
Badan Penelitian dan Pengembangan
Depdiknas,

Diah Harianti

ABSTRAK

Untuk menjawab tantangan perkembangan di masa depan, Pusat Kurikulum menyelenggarakan kegiatan kajian terhadap kebijakan kurikulum dan standar isi satuan pendidikan dan mata pelajaran pendidikan agama. Berbagai data dan informasi telah diperoleh selama rangkaian kegiatan ini dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk naskah akademik.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan naskah akademik kajian standar isi dan implementasi pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) pendidikan dasar dan menengah.

Ruang lingkup kajian ini mencakup standar isi dan implementasi mata pelajaran Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Kajian ini dilakukan bersama Departemen Agama RI dan Lembaga-lembaga Agama terkait, dan menggunakan metode kajian literatur, diskusi bersama ahli dan praktisi pendidikan agama jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dari hasil kajian tersebut diperoleh masukan sebagai berikut:

- *Pendidikan Agama harus memperhatikan dan mengedepankan pendidikan akhlak mulia;*
- *Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi harus disikapi secara positif dan proporsional;*
- *Pendidikan Agama harus konsisten dan tetap menjadi parameter perkembangan yang ada (politik, sosial, budaya, dan lainnya).*

Dengan demikian kurikulum pendidikan agama perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan agama secara nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengkajian dan penyempurnaan Pendidikan Agama harus dilakukan bersifat integral, holistik, sistematis, dan komprehensif.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Abstrak
Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang
- B. Rasional
- C. Tujuan dan Hakekat Pendidikan Agama
- D. Ruang lingkup
- E. Landasan Yuridis
- F. Tujuan Kajian

BAB II. KAJIAN TEORITIS

- A. Perubahan Masyarakat
- B. Pengertian Kurikulum
- C. Prinsip Pengembangan Kurikulum
- D. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

BAB III. TEMUAN KAJIAN

- A. Kajian Dokumen
- B. Kajian Lapangan
- C. Pembahasan Kajian

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia saat ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain bahkan dengan sesama Negara anggota ASEAN. Salah satu faktor utama rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia ini terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan nasional. Program pendidikan yang dirancang sebelumnya belum berhasil menjawab harapan dan tantangan masa kini maupun di masa depan.

Dalam memenuhi harapan dan tantangan di masa depan, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat berharga dan dibutuhkan. Pendidikan di masa depan begitu penting dan memainkan peranan yang sangat fundamental di mana cita-cita suatu bangsa dan negara dapat diraih. Bagi masyarakat suatu bangsa, pendidikan merupakan suatu kebutuhan mendasar dan menentukan masa depannya.

Menghadapi masa depan yang sudah pasti diisi dengan arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan dunia informasi dan komunikasi, pendidikan akan semakin dihadapkan terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks daripada masa sekarang atau sebelumnya. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi atau sumber daya manusia yang memiliki keunggulan pada era globalisasi dan keterbukaan arus informasi dan kemajuan alat komunikasi yang luar biasa.

Dalam membangun pendidikan di masa depan perlu dirancang sistem pendidikan yang dapat menjawab harapan dan tantangan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Sistem pendidikan yang dibangun tersebut perlu berkesinambungan dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan secara nasional dan sekaligus meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia.

Kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal intelektual, modal sosial, dan kredibilitas sehingga tuntutan untuk terus menerus memmutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Mutu lulusan tidak cukup

bila diukur dengan standar lokal saja, sebab perubahan global telah sangat besar mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu bangsa. Terlebih lagi, industri baru dikembangkan dengan berbasis kompetensi tingkat tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi. Dengan demikian, fungsi pendidikan sebagai hak asasi manusia yang mendasar, modal ekonomi, sosial dan politik; alat pemberdayaan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, landasan budaya damai, dan sebagai jalan menuju masyarakat belajar sepanjang hayat, sesungguhnya merupakan langkah penting bagi pembangunan kualitas sebuah bangsa yang berbudaya dan berkarakter.

Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, maka kurikulum di masa depan perlu dirancang sejak sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan Indonesia tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan peserta didik.

Untuk menjawab persoalan sebagaimana dikemukakan di atas, Pusat Kurikulum melakukan upaya dengan menyelenggarakan kegiatan kajian, terutama kajian terhadap Standar Isi yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 tahun 2006.

B. Rasional.

Pendidikan agama di sekolah seharusnya memberikan warna bagi lulusan pendidikan, khususnya dalam merespon segala tuntutan perubahan yang ada di Indonesia. Hingga kini pendidikan agama dipandang sebagai acuan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, tetapi dalam kenyataannya dipandang hanya sebagai pelengkap. Dengan demikian, terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Akibatnya, peranan serta efektivitas pendidikan agama di sekolah sebagai pemberi nilai spiritual terhadap kesejahteraan masyarakat dipertanyakan. Dengan asumsi jika pendidikan agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakatpun akan lebih baik.

Kenyataannya, seolah-olah pendidikan agama dianggap kurang memberikan kontribusi ke arah perbaikan kondisi masyarakat. Setelah ditelusuri, pendidikan agama menghadapi beberapa kendala, antara lain; waktu yang disediakan hanya dua jam pelajaran dengan muatan materi yang begitu padat dan memang penting, yakni menuntut pematapan pengetahuan hingga terbentuk watak dan kepribadian yang berbeda jauh dengan tuntutan terhadap mata pelajaran lainnya.

Memang tidak adil menimpakan tanggung jawab atas munculnya kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu kepada pendidikan agama di sekolah, sebab pendidikan agama di sekolah bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian siswa. Apalagi dalam pelaksanaan pendidikan agama tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan yang mendorong dilakukannya penyempurnaan

terus menerus. Kelemahan lain, materi pendidikan agama, termasuk bahan ajar akhlak atau budi pekerti, lebih terfokus pada pengayaan pengetahuan (kognitif) dan minim dalam pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik). Kendala lain adalah kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai pendidikan agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu lemahnya sumber daya guru dalam pengembangan pendekatan dan metode yang lebih variatif, minimnya berbagai sarana pelatihan dan pengembangan, serta rendahnya peran serta orang tua siswa.

C. Tujuan dan Hakekat Pendidikan Agama

1. Tujuan pendidikan agama

Pada dasarnya pendidikan agama bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pendidikan ini kemudian dirumuskan secara khusus oleh masing-masing agama.

2. Hakekat pendidikan agama

Pendidikan Agama merupakan rumpun mata pelajaran yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memperteguh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia/budi pekerti luhur dan menghormati penganut agama lain.

Hakekat pendidikan ini kemudian dirumuskan secara khusus oleh masing-masing agama.

D. Ruang Lingkup.

Kajian ini mencakup lingkup rumpun pelajaran:

- Pendidikan Agama Islam, yang terdiri dari aspek: Al Quran; Keimanan/Aqidah; Akhlak Mulia; Fiqih Ibadah/Muamalah; dan Tarikh Islam.
- Pendidikan Agama Kristen, yang terdiri dari aspek: Allah dan Karya-Nya; dan Nilai-nilai Kristiani.
- Pendidikan Agama Katolik yang terdiri dari aspek: Pribadi dan Lingkungan; Yesus Kristus dan Kabar baik-Nya; Arti dan makna Gereja; Hidup bermasyarakat.
- Pendidikan Agama Hindu yang terdiri dari aspek: Sradha; Kepemimpinan; Budaya; susila; Kitab suci; Orang suci; Alam semesta; Tempat suci; Hari suci; Sejarah Agama Hindu; dan Yadnya.
- Pendidikan Agama Buddha yang terdiri dari aspek: Saddha (Keyakinan); Sila, Samadhi, dan Panna; Tipitaka/Tripitaka; dan Sejarah.
- Pendidikan Agama Khonghucu.

E. Landasan Yuridis

Landasan berlakunya kurikulum tingkat satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SNP)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Mendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi
- d. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- e. Peraturan Mendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
- f. Peraturan Mendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006.
- g. Surat Edaran Mendiknas Nomor 33/MPN/SE/2007 tentang Sosialisasi KTSP.

F. Tujuan Kajian.

Kajian ini bertujuan untuk:

- Melakukan telaah kritis terhadap dokumen standar isi yang meliputi standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan standar kompetensi lulusan.
- Kajian terhadap implementasi standar isi dijangking melalui pengalaman guru.
- Menyusun rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan terhadap dokumen dan implementasinya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB II. KAJIAN TEORITIS

A. Perubahan Masyarakat.

Abad baru yang sering kali juga disebut abad globalisasi yang memiliki beberapa kecenderungan yang, terutama bagi dunia pendidikan agama di Indonesia, sekaligus menjadi tantangan. Pertama, menguatnya hasrat untuk kembali kepada ajaran agama sekalipun perwujudannya kadangkala baru sebatas simbol. Tantangannya bagi pendidikan agama adalah bagaimana menyambut kecenderungan ini sehingga ajaran agama yang hakiki dapat dipahami dan diamalkan. Kedua, berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang teknologi informasi. Kecenderungan ini menjadikan perananan tradisional guru sebagai tranformer ilmu pengetahuan kurang relevan karena dalam situasi tertentu peserta didik bisa jadi pengetahuannya melebihi guru karena kemudahan mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan melalui media internet. Ketiga, tanggalnya batas-batas negara dan budaya tetapi sebaliknya tumbuh dan bangkit kelompok-kelompok yang berdasarkan suku ras dan agama. Tantangan bagi pendidikan agama adalah bagaimana menjadikan meleburnya masyarakat dunia itu tidak menggoyahkan dan mencabut nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat. Keempat, semangat dan praktek kompetensi akan mendominasi masyarkat sehingga prinsip “bangkit dari ketertinggalan” akan menjadi jiwa dan nafas masyarakat bangsa (Zamroni, 1997). Tantangannya bagi pendidikan agama adalah bagaimana mendorong peserta didik untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan yang ditempuhnya.

Pendidikan agama adalah pendidikan yang kompleks karena menyentuh keseluruhan ranah pendidikan. Pendidikan gama tidak saja menyampaikan materi pengetahuan agama kepada peserta didik tetapi juga harus membimbing mereka untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan agama. Oleh karena itu konsep pendidikan agama yang sesuai dengan kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sistem pendidikan yang holistik, konprehensif, dan integral. Sudah saatnya untuk mengubah paradigma pendidikan agama yang diajarkan kepada peserta didik, yaitu mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai perilaku dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik bukan hanya dituntut untuk mengetahui dan menghafal, akan tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata sehari-hari (Mukhtar, 2003).

Kurikulum agama merupakan pemandu utama bagi penyelenggaraan pendidikan secara formal, yang menjadi pedoman bagi setiap guru, kepala sekolah dan kerangka (framework) pendidikan dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari. Lebih dari itu, kurikulum merupakan pengejawantahan dari tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kerena itu, kurikulum memuat jumlah mata pelajaran, garis pokok pengajaran, dan jumlah jam belajar masing-masing mata pelajaran dalam satu minggu, selama satu tahun ajaran pada jenjang pendidikan tertentu (Azyumardi Azra, Strategi Pengembangan Kurikulum (2003).

B. Pengertian Kurikulum.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum dapat dilihat dalam tiga dimensi yaitu, sebagai ilmu (*curriculum as a body of knowledge*), sebagai sistem (*curriculum as a system*) dan sebagai rencana (*curriculum as a plan*). Kurikulum sebagai ilmu dikaji konsep, landasan, asumsi, teori, model, praksis, prinsip-prinsip dasar tentang kurikulum. Kurikulum sebagai sistem dijelaskan kedudukan kurikulum dalam hubungannya dengan sistem dan bidang-bidang lain, komponen-komponen kurikulum, kurikulum berbagai jalur, jenjang, jenis pendidikan, manajemen kurikulum, dan sebagainya. Kurikulum sebagai rencana mencakup macam-macam rencana dan rancangan atau desain kurikulum. Kurikulum sebagai rencana ada yang bersifat menyeluruh untuk semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan ada pula yang khusus untuk jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat strategis karena *merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu*. Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas atau inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik.

Permasalahannya sekarang, bagaimana mensiasati kurikulum dan silabus mata pelajaran agama yang pada satu sisi – seperti dikeluhkan banyak guru dan orang tua peserta didik – dirasakan terlalu sedikit waktu atau jam pembelajarannya sementara pada sisi yang lain teramat banyak atau berat tuntutan yang dibebankan pada pendidikan agama, maka mutlak diperlukan rancang-bangun kurikulum pendidikan agama yang pada satu sisi harus rela menyesuaikan dengan waktu jam pembelajaran yang tersedia; sementara pada sisi yang lain harus pula mampu memberikan pendidikan agama dan bahkan keagamaan yang relatif menyeluruh (komprehensif) dan bahkan utuh (holistik).

Kurikulum pendidikan agama yang bersifat utuh dan menyeluruh inilah seyogyanya dirancang bangun oleh ahli-ahli pendidikan kita dan terutama para pendidiknya. Ciri-ciri kurikulum pendidikan agama yang utuh dan menyeluruh itu seharusnya sebagai bahan yang layak didiskusikan. Sedikitnya kurikulum pendidikan agama memiliki beberapa ciri utama sebagai berikut:

1. Kurikulum pendidikan agama yang memuat semua aspek agama yang hendak diajarkan oleh guru pendidikan agama; kesemua aspek itu dididikkan dengan mengacu kepada kitab suci.
2. Kurikulum pendidikan agama yang memadukan semua aspek ajaran agamanya yang hendak diajarkan oleh guru pendidik agama itu sebagai satu-kesatuan yang

- tidak dapat dipisah-pisahkan apalagi dipertentangkan antara aspek yang satu dengan atau dari aspek yang lain;
3. Kurikulum pendidikan agama yang mampu mengintegrasikan ilmu/nilai agama itu sendiri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lain (misal: Sain, Bahasa, Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lain-lain), yang paling sedikit dianggap sama kepentingan dan kegunaannya bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dan bahkan umat manusia pada umumnya.

Rancang bangun kurikulum yang bersifat utuh dan menyeluruh secara internal maupun eksternal, ini memang tidak dapat dikatakan pekerjaan mudah, tetapi juga tidak beralasan apabila dinyatakan sebagai suatu pekerjaan yang sulit apalagi mustahil. Kurikulum masa depan yang demikian bisa saja dirancang/ bangun, asal saja dikerjakan oleh pihak yang benar-benar ahli dan berkemauan untuk membentuk kurikulum pendidikan agama sebagai mana yang diharapkan. Demikian pula dengan ihwal para guru/pendidiknya dilapangan yang juga harus benar-benar ahli atau mumpuni baik teori maupun praktek.

C. Prinsip Pengembangan Kurikulum.

Pengembangan kurikulum di tanah air cenderung kepada pendekatan kompetensi dasar. Sedikitnya ada tiga pendekatan pengembangan kurikulum yang dianut berbagai negara di dunia. Pertama pendekatan materi (content based approach) yang menekankan pada materi mata pelajaran, yaitu siswa cenderung pada penguasaan sederet ruang lingkup materi atau memiliki banyak pengetahuan. Ini terjadi pada kurikulum sebelumnya di Indonesia. Kedua, pendekatan kemampuan dasar (competence based approach) yang menekankan pada pengembangan keterampilan dasar (basic skills) mata pelajaran. Di dalam agama adalah konsep-konsep dasar agama, yang kemudian konsep dasar ini dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Ketiga, antara ke dua pendekatan di atas atau gabungan dari keduanya, yaitu pendekatan materi dan kompetensi. Barangkali pendekatan ke tiga ini yang dianut oleh kurikulum di Indonesia. Indikasinya dapat dilihat pada dokumen silabus yang kini sedang dikembangkan satuan pendidikan dengan mencantumkan kolom materi.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut.

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.

b. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

f. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

D. Prinsip Pelaksanaan Kurikulum

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut.

Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.

1. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
2. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
3. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
4. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *alam takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh dan teladan).
5. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
6. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.

BAB III. TEMUAN KAJIAN

A. Kajian Dokumen

Dengan arus globalisasi dan keterbukaan serta kemajuan dunia informasi dan komunikasi, maka pendidikan akan semakin dihadapkan terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks daripada masa sekarang atau sebelumnya. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi atau sumber daya manusia yang memiliki keunggulan pada era globalisasi dan keterbukaan arus informasi dan kemajuan alat komunikasi yang luar biasa.

Selain itu, setelah kebijakan pemerintah tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan di sosialisasikan, ada beberapa hal perlu dibenahi dan disempurnakan guna tercapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Di antaranya adalah dalam memahami dokumen dan pelaksanaannya. Pada tahun 2006 pemerintah pusat melakukan sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan harapan pemerintah provinsi kemudian melakukan hal sama ke tingkat Kabupaten/Kota, dan selanjutnya kabupaten/kota melanjutkan ke tingkat satuan pendidikan di masing-masing daerah. Harapan ini memang telah berlangsung, namun terjadi ada distorsi dalam pemahaman terhadap konsep, walaupun tidak besar.

Setelah pemerintah pusat melakukan sosialisasi KTSP dan melakukan kajian bersama ahli dan praktisi diperoleh informasi bahwa sebagian guru pendidikan agama ada yang belum mendapatkan pelatihan dan menerima dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.

- Belum semua guru pendidikan agama memahami isi dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (dokumen 1 dan 2).
- Belum semua guru mampu melakukan analisis materi pembelajaran dan bagaimana mengembangkan materi dan nilai-nilainya secara vertikal maupun horizontal, termasuk juga kemampuan mengintegrasikannya dengan mata pelajaran lain.
- Sebagian sekolah mengalami kesulitan merumuskan latar belakang masalah, visi, misi, dan tujuan dalam penyusunan KTSP
Antara visi, misi, tujuan, dan program yang ada belum menunjukkan adanya keterkaitan.

Permasalahan umum yang berkaitan dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) diperoleh informasi sebagai berikut:

- Sebagian guru pendidikan agama belum memahami metode pencapaian SK dan KD yang seharusnya dikembangkan di dalam silabus. Bagi sekolah kategori baik, seharusnya materi standar yang terdapat di standar isi dikembangkan lebih dalam dan meluas sesuai dengan tingkat kemajuan sekolahnya.

- Pemahaman guru dan tenaga kependidikan terhadap pengembangan kurikulum termasuk tingkat gradasi materi atau keilmuannya belum memadai.

B. Kajian Lapangan

Berdasarkan kajian lapangan dan pengamatan guru-guru pendidikan agama terhadap naskah silabus yang disusun satuan pendidikan, diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:

1. Isi silabus yang disusun guru belum menggambarkan pengembangan materi atau kompetensi yang seharusnya menjadi ciri dan potensi masing-masing sekolah, akan tetapi dikembangkan masih sebatas pada standar isi tanpa ada pengembangannya, sehingga bagi sekolah yang mutunya kategori baik muncul pandangan terjadinya pendangkalan terhadap materi.
2. Pemahaman sebagian tenaga pendidik dalam menyusun dan merumuskan perencanaan pembelajaran perlu mendapat perhatian pembina pemerintah setempat. Diperoleh informasi bahwa banyak guru yang belum mengikuti sertifikasi atau belum memiliki kompetensi memadai.
3. Pengetahuan dasar agama peserta didik sangat beragam. Diperoleh informasi, bahwa ada sebagian peserta didik belum memiliki bekal agama yang memadai.
4. Minimnya sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan agama, misalnya alat peraga, termasuk tempat ibadah, terutama pada Sekolah Dasar..
5. Sejak tahun 2006, pemerintah pusat telah melakukan sosialisasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan Minimnya sosialisasi tentang penerapan kurikulum
6. Kurangnya perangkat administrasi, misalnya buku absen, dan buku daftar nilai.

C. Pembahasan Kajian Dokumen dan Lapangan.

Kajian pada uraian di atas menuntun ke arah identifikasi alasan pengembangan kurikulum pendidikan agama menyelaraskan pada perkembangan masyarakat melalui kajian komprehensif dan holistik. Alasan-alasan yang dapat diidentifikasi adalah antara lain:

1. Perubahan dan tuntutan masyarakat seiring dengan reformasi dan semangat demokrasi, keterbukaan, globalisasi menuntut reorientasi pendekatan dan pengkajian ulang serta reinterpretasi berbagai materi dan nilai-nilai agama. Selain itu, semakin kuat tuntutan dari kalangan masyarakat agar pendidikan agama, khususnya akhlakul karimah diintegrasikan ke dalam kurikulum.
2. Kurikulum pendidikan agama dapat mendorong pada pemahaman yang lebih universal dan saling menghargai yang didasarkan pada nilai-nilai fitrah kemanusiaan dan hukum yang berlaku terhadap perbedaan-perbedaan.
3. Sebenarnya ada unsur psikologis, antropologis, dan sosiologis memungkinkan untuk memudahkan peserta didik untuk memahami materi pelajaran dan mengapresiasi potensinya.

4. Kurikulum mendatang hendaknya lebih mengedepankan pendekatan kompetensi (competence based approach) yang mengarah kepada pengembangan kemampuan dasar peserta didik. Setiap peserta didik yang memiliki kemampuan memahami materi pelajaran memungkinkannya berani mengungkapkan dan mengembangkan kemampuannya.
5. Aspek kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan ranah yang diharapkan dikembangkan dalam pembelajaran di kelas untuk sebagian besar mata pelajaran.
6. Aspek psikomotorik sebagai gambaran riil yang langsung teramati merupakan hal yang akan membekas dan lama diingat oleh peserta didik itu sendiri.
7. Nilai-nilai universal dalam pendidikan agama memungkinkan peserta didik berkembang secara bebas dan tidak terkait atau terkungkung dalam fanatisme sempit.
8. Pelajaran agama merupakan salah satu sarana untuk menjadikan peserta didik semakin beriman dan bertakwa. Aspek iman dalam pelajaran agama seharusnya menonjol dalam setiap aspek yang diajarkan dalam pelajaran agama.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan.

1. Konsep dan sistem pendidikan agama ke depan harus dikaji dan dirancang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, sosial dan budaya bangsa serta menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan globalisasi.
2. Implementasi pendidikan agama pada masa depan menekankan pada :
 - Pengembangan materi dan pembelajaran yang bersifat utuh (holistik)
 - Mengedepankan nilai-nilai universal
 - Terintegrasi dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya
 - Memperhatikan keragaman nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia
 - Implementasi pendidikan agama menjadi tanggung jawab semua pihak (Dinas Pendidikan, Departemen Agama, Pengawas, Kepala Sekolah, Semua Guru Mata Pelajaran, Komite Sekolah, Yayasan Pengelola Pendidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat.)
 - Implementasi pendidikan agama mengedepankan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Pembelajaran pendidikan agama mengedepankan persamaan dan menghargai perbedaan.
 - Dalam setiap satuan jenjang pendidikan, mengedepankan kehidupan beragama (religius).

B. Rekomendasi

1. Untuk program jangka pendek tahun 2008/2009 perlu dilakukan kaji ulang terhadap standar Isi, standar kompetensi lulusan dan implementasinya sebagai masukan penyempurnaan dan perbaikan
2. Untuk program jangka panjang perlu dilakukan kajian dan desain ulang sistem pendidikan agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) yang bersifat integral, holistik, sistematis, dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali, Muhammad, 2001, "*Guru dalam Proses Belajar Mengajar*", Sinar Baru Algesindo, Bandung.
2. Azyumardi, 2003, Paper pada "Strategi Pengembangan Kurikulum", Departemen Agama RI, Jakarta.
3. Belen. S, 2000, Paper "*Kajian Ciri-Ciri Kurikulum Baru*" Puskur, Jakarta.
4. Hamalik, Oemar, 2003, "*Proses Belajar Mengajar*", Cet 2, Bumi Aksara, Jakarta.
5. Muhaimin, et.al, 1993, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofi dan Kerangka dasar Operasionalnya*, Trigenda, Bandung.
6. Mukhtar, 2003, "*Desain Pembelajaran Pendidikan Agama*", Penerbit Angkasa, Bandung.
7. Mulyasa, 2006, *Kurikulum yang Disempurnakan, Pengembangan Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar*, Rosdakarya, bandung.
8. Nasution, Ani Hakim (1990) "*Suatu pemikiran tentang penjurusan di Sekolah Menengah*", Paper dalam "*Seminar Reorientasi dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Menengah*", Puskur, Jakarta.
9. Rosyada, Dede, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokrasi, sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Prenada Media, Jakarta.
10. Tafsir, Ahmad, (2000), "*Konsep Pendidikan Agama Islam*", Penerbit Anngkas, Bandung.
11. Usman, Mohammad Uzer, 2005, *Menjadi Guru Profesional*, Remaja Rosdakarya, Bandung.